

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL DI KOTA BOGOR PADA ABAD KE-19

2.1 Sejarah Kota Bogor Sebagai Administrasi Kolonial

Kota Bogor pada masa kolonial Belanda dikenal dengan sebutan Buitenzorg, memiliki berbagai versi mengenai asal-usul namanya. Salah satu pendapat menyatakan bahwa nama "Bogor" berasal dari pelafalan masyarakat Sunda terhadap Buitenzorg, yang pada masa kolonial merupakan nama resmi kota ini. Lidah masyarakat Sunda yang kurang terbiasa dengan pengucapan bahasa Belanda menyebabkan perubahan fonetik, sebagaimana terjadi pada kata "Batavia" yang diucapkan menjadi "Betawi." Beberapa contoh lain dalam bahasa Sunda menunjukkan perubahan serupa, seperti "ziekenhuis" yang berubah menjadi "sikenhes" dan "buis" yang menjadi "bes".¹¹ Berdasarkan pola linguistik ini, pelafalan Buitenzorg dalam dialek Sunda kemungkinan besar mengalami perubahan menjadi "Bogor."

Pendapat lain menyebutkan bahwa nama "Bogor" berasal dari kata dalam bahasa Arab, yakni "bogar,"¹² yang berarti sapi. Dugaan ini dikaitkan dengan keberadaan patung sapi di kompleks Kebun Raya Bogor serta komunitas pedagang Arab yang bermukim di daerah Pakojan, yang kemungkinan turut memengaruhi penamaan kota. Akan tetapi, hipotesis ini masih minim bukti linguistik yang kuat. Pendapat ketiga menghubungkan asal-usul nama Bogor dengan kata "bokor," yaitu sejenis wadah logam. Secara fonetik, perubahan dari "bokor" ke "Bogor" dianggap lebih memungkinkan dibandingkan teori lainnya, mengingat dalam bahasa Sunda sering terjadi perubahan bunyi tanpa mengubah makna dasar kata. Selain itu, dalam budaya Sunda, kata "bogor" juga merujuk pada pohon kawung atau aren (*Arenga pinnata*), yang banyak ditemukan di wilayah ini. Di beberapa daerah seperti Bekasi, "Bogor" juga dikaitkan dengan daging pohon kawung yang biasa dijadikan bahan pangan.

¹¹ Saleh Danasasmita dan M. Soleh, *Sejarah Bogor* (Bandung: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1983), hlm 1-2

¹² *Ibid.*, hlm 3

Berdasarkan berbagai pendapat tentang asal-usul nama Bogor, analisis linguistik menunjukkan bahwa perubahan pelafalan dari "Buitenzorg" menjadi "Bogor" dalam dialek Sunda merupakan kemungkinan yang paling dapat dipertanggungjawabkan. Fenomena adaptasi fonetik ini sejalan dengan contoh-contoh lain dalam bahasa Sunda, seperti perubahan "Batavia" menjadi "Betawi" dan "ziekenhuis" menjadi "sikenhes." Proses ini mencerminkan kecenderungan alami dalam bahasa untuk menyederhanakan atau menyesuaikan kata asing agar lebih mudah diucapkan dalam struktur fonologis lokal. Selain itu, catatan sejarah kolonial menunjukkan bahwa Buitenzorg memang menjadi sebutan resmi untuk wilayah ini, sehingga perubahan pelafalan oleh masyarakat lokal menjadi "Bogor" merupakan proses yang masuk akal secara historis dan linguistik. Sementara itu, teori yang mengaitkan nama "Bogor" dengan kata Arab "bogar" atau dengan istilah "bokor" dan pohon kawung, meskipun menarik, tidak didukung bukti historis dan linguistik sekuat teori adaptasi pelafalan Buitenzorg. Oleh karena itu, pendapat yang menghubungkan nama "Bogor" dengan perubahan fonetik dari Buitenzorg dinilai yang paling dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan catatan sejarah.

Buitenzorg pada masa kolonial Belanda mulai berkembang sebagai pusat administrasi sejak abad ke-18. Berdasarkan resolusi tanggal 10 Agustus 1745, van Imhoff memilih Buitenzorg, bagian dari wilayah Kampong Baroe, sebagai lokasi untuk membangun tempat peristirahatan yang kelak dikenal sebagai Istana Buitenzorg.¹³ Dalam dokumen VOC, tepatnya dalam akta Van Girssen 7 April 1752, nama Ngabehi Raksa Candra tercatat sebagai "hoofd van de negorij Bogor," atau kepala kampung Bogor. Kampung Bogor pada masa itu berlokasi di sekitar kawasan Kebun Raya saat ini. Status Bogor pada pertengahan abad ke-18 masih sebagai sebuah kampung yang berada dalam lingkungan administratif Kabupaten Kampung Baru.¹⁴ Pada masa kolonial Belanda, Buitenzorg (sekarang Bogor) menjadi lokasi strategis yang menarik perhatian Gubernur Jenderal Baron van Imhoff (1743–1750).

¹³ J. Faes, *Geschiedenis van Buitenzorg* (Amsterdam: Albrecht, 1902), diakses melalui Delpher. Hlm 20

¹⁴ Ngabehi Raksatjandra, "Rodovid Indonesia, diakses 3 April 2025, <https://id.rodovid.org/wk/Orang%3A1066550>.

Gubernur Jenderal Gustaaf Willem van Imhoff mengamati potensi pertanian di Buitenzorg selama kunjungannya pada tahun 1744. Wilayah ini, yang pada saat itu “hampir seluruhnya tidak berpenghuni dan sebagian besar liar,” menawarkan peluang untuk pengembangan pertanian produktif. Van Imhoff berupaya mendorong penduduk lokal, khususnya petani Jawa, untuk mengolah tanah secara efisien melalui “teladan yang baik”. Pembangunan tempat peristirahatan di Buitenzorg menjadi sarana untuk menunjukkan praktik pengelolaan tanah yang optimal, khususnya untuk budi daya kopi, yang merupakan komoditas utama bagi *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC).¹⁵ Dengan demikian, pembangunan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga mendukung agenda ekonomi kolonial.

Pembangunan tempat peristirahatan oleh Gubernur Jenderal Gustaaf di Buitenzorg pada tahun 1745 sebagai simbol otoritas kolonial Belanda. Ia memperkuat kekuasaan VOC melalui kepemilikan “*in officio*” atas tanah tersebut, sebagaimana tercantum dalam resolusi 10 Agustus 1745.¹⁶ Pemerintah kolonial Belanda menjadikan Buitenzorg sebagai kediaman resmi Gubernur Jenderal untuk menegaskan kehadiran VOC di wilayah strategis dekat Priangan, yang dikenal sebagai pusat produksi kopi. Kebijakan penyerahan tanah kepada Gubernur Jenderal beserta keturunannya dilakukan dengan syarat bahwa hasil pertanian seperti kopi wajib diserahkan kepada VOC. Pemerintah kolonial menggunakan tempat peristirahatan ini tidak hanya sebagai lokasi relaksasi, tetapi juga sebagai pusat pengawasan terhadap kegiatan ekonomi. Gubernur Jenderal mengelola wilayah tersebut dengan pengawasan langsung terhadap perkebunan, sehingga mendukung kelancaran sistem ekonomi kolonial. Seiring dengan perkembangan wilayahnya, pada tahun 1763, melalui akta resmi, Bogor ditetapkan sebagai *Buitenzorg*. Selanjutnya, kota ini mengalami perubahan besar dalam struktur administratif dan tata ruangnya pada abad ke-19.

¹⁵ J. Faes, *Geschiedenis van Buitenzorg* (Amsterdam: Albrecht, 1902), diakses melalui Delpher. Hlm 24

¹⁶ *Ibid.*, hlm 25

Pada masa kolonial Hindia Belanda, pemilihan lokasi pembangunan infrastruktur publik tidak hanya didasarkan pada kebutuhan administratif, tetapi juga pada pertimbangan strategis, ekonomi, dan geografis. Istana Bogor (dulu dikenal sebagai Istana Buitenzorg) menjadi simbol kekuasaan kolonial sekaligus pusat eksperimental dalam pengelolaan ruang kota yang dirancang sesuai kepentingan politik, ekonomi, dan kesehatan para pejabat tinggi Belanda. Gubernur Jenderal Hindia Belanda pertama kali memilih Buitenzorg sebagai tempat kediamannya secara resmi pada tahun 1836, dan meskipun pusat pemerintahan sempat dipindahkan kembali ke Batavia pada tahun 1847, pemanfaatan Bogor sebagai pusat administratif tetap berlangsung hingga akhir abad ke-19.¹⁷ Salah satu alasan utama pembangunan Istana Bogor adalah pertimbangan iklim dan topografi.

Keberadaan Istana Bogor dan Kebun Raya memengaruhi kebijakan tata kota yang berbasis segregasi sosial. Wilayah yang dihuni oleh pejabat kolonial dan masyarakat Eropa ditata lebih rapi dan dilengkapi dengan fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan kawasan pribumi. Keputusan pemerintah kolonial pada tahun 1845 mengatur pemukiman berdasarkan status sosial. Kemudian, Gubernur Jenderal Hindia Belanda menetapkan batas-batas administratif ibu kota Afdeling Buitenzorg pada tahun 1871. Secara resmi, batas tersebut adalah: sebelah utara mulai dari Pilar hingga Jembatan Cipakancilan, sebelah barat dari Jembatan Cipakancilan hingga Jembatan Batutulis, sebelah selatan dari Batutulis hingga Ciliwung, dan sebelah timur dari Ciliwung hingga Pilar.¹⁸ Penataan wilayah ini semakin mengukuhkan posisi Bogor sebagai kota administratif penting dalam sistem pemerintahan kolonial Belanda.

VOC menetapkan sistem kepemilikan resmi ini untuk menjamin stabilitas pengelolaan tanah oleh pejabat yang sedang menjabat. Dewan Hindia menyetujui permintaan van Imhoff dengan syarat bahwa tanah tidak boleh disalahgunakan oleh ahli waris. Dengan demikian, pembangunan tempat peristirahatan di Buitenzorg

¹⁷ G. Kolff & Co., *Gids voor Buitenzorg en Omstreken* (Batavia: G. Kolff & Co., 1905), diakses melalui Delpher. Hlm 14

¹⁸ Zakaria, Mumuh M.. *Kota Bogor: studi tentang perkembangan ekologi kota abad ke-19 hingga ke-20*. Indonesia: Sastra Unpad Press, Fakultas Sastra, Universitas Padjadjaran, 2010. Hlm 51

berfungsi ganda: sebagai simbol prestise kekuasaan kolonial dan sebagai instrumen untuk mengamankan kepentingan ekonomi VOC secara berkelanjutan. Pemilihan Buitenzorg sebagai pusat administratif tidak terlepas dari kebijakan kolonial yang ingin menciptakan pusat pemerintahan yang lebih tertib dan teratur dibandingkan Batavia yang dianggap terlalu padat dan kacau. Sejak tahun 1888, Sekretariat Umum pemerintahan kolonial dipindahkan ke Buitenzorg.¹⁹ Dalam struktur pemerintahan kolonial, Buitenzorg ditetapkan sebagai ibu kota distrik kediaman dan kursi Asisten Residen serta Demang (kepala daerah).²⁰

Buitenzorg berkembang menjadi pusat pemerintahan, penelitian ilmiah, dan ekonomi yang penting di Hindia Belanda. Dengan letak geografis pada koordinat 106° 48 BT dan 6° 36' LS, curah hujan rata-rata 26°C, dengan ketinggian minimum 190 mdpl dan ketinggian maksimum 330 mdpl.²¹ Kota ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat peristirahatan Gubernur Jenderal tetapi juga termasuk dalam *Residentie Batavia* dan memiliki struktur pemerintahan yang dikendalikan langsung oleh otoritas kolonial. Sebagai pusat administrasi, Buitenzorg dilengkapi dengan berbagai infrastruktur, seperti kantor pemerintahan, jalur telegraf, dan jalur transportasi yang menghubungkannya dengan Batavia dan daerah lainnya. Administrasi Buitenzorg berada di bawah kendali seorang Asisten Residen yang mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk regulasi hukum dan tata kelola penduduk.

Kota ini memiliki peran strategis dalam pemerintahan kolonial Belanda di abad ke-19. Posisinya yang berada di dataran tinggi dengan iklim lebih sejuk dibandingkan Batavia menjadikannya tempat ideal bagi pejabat kolonial untuk menghindari kondisi lingkungan yang kurang sehat di ibu kota. Menurut P.J.M. Nas dalam *The Indonesian Town Revisited* (1993), pemindahan beberapa fungsi administrasi ke Bogor bertujuan untuk mengurangi beban Batavia yang mengalami masalah kesehatan akibat lingkungan tropis yang lembap dan penyebaran penyakit.

¹⁹ G. Kolff & Co., *Gids voor Buitenzorg en Omstreken* (Batavia: G. Kolff & Co., 1905), diakses melalui Delpher. Hlm 17

²⁰ *Ibid.*, Hlm 16

²¹ Neneng Hendriyani, *Bogor: Peninggalan Sejarah dari Masa ke Masa* (Bandung: SituSeni, 2017), hlm 3

Selain menjadi tempat tinggal resmi gubernur jenderal, Bogor juga berkembang sebagai pusat kebijakan kolonial di luar Batavia, khususnya dalam bidang agraria dan perkebunan.²²

Sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda di luar Batavia, peran Bogor semakin menonjol pada akhir abad ke-19 seiring dengan pengembangan infrastruktur yang mendukung administrasi kolonial. Istana Bogor menjadi simbol kekuasaan kolonial dan tempat berbagai kebijakan penting. Dalam bukunya, Nas menjelaskan bahwa Bogor bukan sekadar kota satelit, tetapi juga kota dengan tata kelola yang lebih tertata dibandingkan kota-kota lainnya di Jawa.²³ Perencanaan kota Bogor yang berpusat pada Istana Bogor memperlihatkan bagaimana kota ini disiapkan sebagai pusat administrasi alternatif bagi Batavia, terutama untuk kepentingan pejabat tinggi kolonial. Selain itu, permukiman elit Eropa berkembang pesat, didukung dengan sarana dan prasarana yang lebih modern dibandingkan dengan kawasan pribumi.

Nas mencatat bahwa kawasan ini menjadi pusat pengembangan tanaman komersial yang mendukung kepentingan ekonomi kolonial.²⁴ Selain itu, kebijakan tata kota yang berkembang di sekitar Istana dan Kebun Raya mencerminkan perencanaan kota kolonial berbasis segregasi sosial, dengan kawasan Eropa lebih tertata dibandingkan dengan pemukiman pribumi. Keberadaan kebun raya juga mendorong pembangunan infrastruktur kota yang lebih modern, termasuk jalan-jalan utama yang menghubungkan pusat pemerintahan dengan wilayah komersial dan pemukiman elite.

Tata kota Buitenzorg pada masa kolonial sangat dipengaruhi oleh segregasi sosial. Kawasan pemukiman Eropa tertata lebih baik dibandingkan dengan kawasan pribumi. Keberadaan Istana Bogor dan Kebun Raya menjadi pusat kebijakan tata ruang kota. Buitenzorg memperoleh status sebagai *gemeente* (kotapraja) berdasarkan Staatsblad 1905 No. 208, yang memberikan otonomi terbatas dalam pengelolaan administrasi dan keuangan kota pada tahun 1905. memiliki batas

²² Peter J.M.Nas *The Indonesian Town Revisited* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1993), hlm 82.

²³ *Ibid.*, hlm 85.

²⁴ *Ibid.*, hlm 90.

administrasi yang jelas yang memisahkan wilayah perkotaan dari pedesaan sekitarnya, dengan fokus pada pengelolaan yang lebih terpusat untuk kepentingan kolonial, terutama bagi masyarakat Eropa dan elit lokal. Pembentukan Gemeente Buitenzorg pada tahun 1905 merupakan bagian dari Undang-Undang Desentralisasi yang bertujuan menggantikan sistem pemerintahan tradisional dengan administrasi modern, di mana wilayah ini dipimpin oleh seorang Burgemeester, biasanya berkebangsaan Belanda, hingga tahun 1940 ketika posisi tersebut diisi oleh seorang pribumi. Batas administrasi Gemeente Buitenzorg mencakup area inti kota, termasuk wilayah di sekitar Stasiun Buitenzorg, Istana Buitenzorg, dan taman-taman kolonial seperti Wilhelminapark, yang dirancang sebagai pusat administratif dan rekreasi elit.

Regentschap Buitenzorg sebagai kabupaten yang lebih luas, mencakup wilayah pedesaan di luar Gemeente Buitenzorg dan dipimpin oleh seorang Asisten Residen, yang mengawasi administrasi di bawah naungan pemerintah provinsi Jawa Barat yang dibentuk pada tahun 1925 melalui Staatsblad 1924 No. 378. Batas administrasi Regentschap Buitenzorg meliputi distrik-distrik seperti Cisarua, Pondok Gede, Ciawi, Ciomas, Cijeruk, Sindang Barang, Balubur, Dramaga, dan Kampung Baru, yang pada tahun 1746 digabungkan oleh Gubernur Jenderal Gustaaf Willem van Imhoff menjadi satu kesatuan administrasi. Perbedaan batas ini menunjukkan segregasi fungsional, di mana Gemeente Buitenzorg berfungsi sebagai pusat urban yang eksklusif, sementara Regentschap Buitenzorg mencakup wilayah agraris yang mendukung ekonomi kolonial, seperti perkebunan dan persawahan.²⁵

Status ini semakin diperkuat dengan reformasi administrasi tahun 1922 yang memberikan kewenangan lebih besar kepada gemeente dalam pengelolaan pemerintahan lokal. dikenal sebagai *Wijkenstelsel*. Kebijakan ini mengharuskan kelompok etnis tertentu, seperti Tionghoa dan Arab, untuk tinggal di wilayah tertentu dan tidak boleh berdekatan dengan warga pribumi.²⁶ Pembangunan

²⁵J. Faes, *Geschiedenis van Buitenzorg* (Amsterdam: Albrecht, 1902), diakses melalui Delpher. Hlm 25

²⁶ F. C. Pragia, *Pelestarian Lanskap Sejarah Kawasan Khusus Sekitar Kebun Raya Bogor*, hlm 42

infrastruktur seperti jalur telegraf, kantor pemerintahan, serta jaringan transportasi semakin memperkuat peran Bogor sebagai pusat administrasi kolonial yang strategis. Seiring berjalannya waktu, perkembangan pasar di sekitar Kampung Bogor turut berkontribusi dalam kemajuan ekonomi kota ini.²⁷

Pasar yang tumbuh di dekat pusat administrasi menarik para pedagang, termasuk komunitas Tionghoa, yang kemudian berperan dalam perkembangan sektor ekonomi lokal. Para petani yang mengangkut hasil bumi ke gudang-gudang di sekitar pasar juga memanfaatkan kawasan ini sebagai tempat transaksi. Pertumbuhan ekonomi tersebut berkontribusi dalam menjadikan Bogor sebagai salah satu pusat perdagangan penting di Jawa Barat pada masa kolonial.²⁸ Dengan berbagai perubahan yang terjadi selama periode kolonial, Buitenzorg berkembang menjadi kota yang memiliki peran strategis dalam pemerintahan Hindia Belanda. Selain sebagai pusat administrasi alternatif Batavia, kota ini juga memainkan peranan dalam pengembangan agraria dan penelitian ilmiah yang berkontribusi pada kebijakan kolonial di Hindia Belanda. Infrastruktur yang dibangun pada masa itu masih memberikan pengaruh terhadap struktur perkotaan Bogor hingga saat ini.

Wilayah Buitenzorg yang terletak di dataran tinggi memiliki suhu yang lebih sejuk dan kondisi alam yang lebih sehat dibandingkan Batavia yang lembap, panas, dan sering kali dilanda wabah penyakit seperti malari. Gambaran geografis dalam laporan kolonial menyebutkan bahwa Bogor berada “jauh lagi di pegunungan biru, melawan lereng yang perlahan menjulang,” menunjukkan letaknya yang berada di kaki Gunung Salak serta dikelilingi hutan lebat, jurang, dan persawahan.²⁹ Selain pertimbangan iklim, keberadaan sistem irigasi yang kompleks dan subur turut mendukung keputusan pemindahan pusat aktivitas administratif ke Buitenzorg. Sungai Tjidani (kini Cisadane) memainkan peran penting dalam menyediakan air bagi kanal-kanal dan lahan pertanian yang berada di sekitar wilayah tersebut. Sistem irigasi seperti Tji Pekantjilan yang digali pada akhir abad ke-18 menjadi kunci untuk menyuplai air dari Tjidani ke Tjiliwong, serta menjaga

²⁷ *Ibid.*, hlm 75

²⁸ *Ibid.*, hlm 97

²⁹ J. Faes, *Geschiedenis van Buitenzorg* (Amsterdam: Albrecht, 1902), diakses melalui Delpher. Hlm 15

navigasi kanal-kanal Batavia tetap berjalan.³⁰ Namun, pada akhir abad ke-19, prioritas penggunaan air dialihkan untuk mengairi sawah dan mendukung pertanian lokal. Hal ini memperkuat posisi Buitenzorg sebagai wilayah yang tidak hanya strategis secara administratif, tetapi juga agrikultur.

2.2 Kondisi Sosial Masyarakat Kota Bogor

Struktur sosial masyarakat Kota Buitenzorg selama masa kolonial mencerminkan tatanan hierarkis yang disusun berdasarkan klasifikasi ras dan status hukum. Masyarakat terbagi ke dalam tiga kategori utama: Eropa, Timur Asing (seperti Tionghoa dan Arab), dan Pribumi. Pembagian ini tidak hanya berlaku dalam catatan administratif, tetapi juga menentukan posisi sosial, hak hukum, dan terutama akses terhadap ruang publik dalam kehidupan kota sehari-hari. Penduduk Eropa mendominasi kawasan pusat kota dan mengakses langsung berbagai fasilitas publik strategis, seperti taman kota di sekitar Kebun Raya, stasiun Buitenzorg, kantor pos utama, dan kompleks perkantoran pemerintahan. Sebaliknya, masyarakat Pribumi yang tinggal di kampung-kampung seperti Kebonpedes, Kampong Poelo, atau Kampong Bong, meskipun secara administratif tercatat dalam desa seperti Pabaton atau Bondongan, tetap menghadapi batasan spasial dan sosial yang menghambat mobilitas mereka ke ruang-ruang publik kota.

Selain segregasi pemukiman, perbedaan dalam struktur pekerjaan juga terlihat. Penduduk Eropa umumnya menempati posisi sebagai pegawai administrasi, ilmuwan, atau pemilik perkebunan, sedangkan penduduk pribumi lebih banyak bekerja sebagai buruh di sektor pertanian, perkebunan, serta tenaga kasar di kota. Komunitas Tionghoa, yang memiliki peran penting dalam sektor perdagangan, banyak menjalankan usaha di sekitar Pasar Bogor dan Jalan Surya Kencana, yang hingga kini masih dikenal sebagai pusat perdagangan di Bogor.³¹ Perubahan ekologi perkotaan juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Bogor.

³⁰ *Ibid.*, Hlm 16

³¹ F. C. Pragia, *Pelestarian Lanskap Sejarah Kawasan Khusus Sekitar Kebun Raya Bogor* hlm 79

Berkembangnya infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, serta jalur kereta api Batavia–Buitenzorg sejak 1873, mobilitas penduduk meningkat dan membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat. Namun, modernisasi ini lebih banyak menguntungkan kelompok elite kolonial dibandingkan masyarakat pribumi, yang sering kali hanya menjadi tenaga kerja dalam pembangunan tersebut. Selain sektor ekonomi, kehidupan sosial masyarakat juga dipengaruhi oleh kebijakan kolonial di bidang pendidikan dan budaya. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial lebih banyak ditujukan bagi anak-anak Eropa dan kelompok elite pribumi, sementara sebagian besar masyarakat pribumi hanya memiliki akses terbatas terhadap pendidikan formal.³² Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam tingkat literasi dan keterampilan di antara kelompok masyarakat, yang pada akhirnya memperkuat stratifikasi sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun ada keterbatasan akibat kebijakan kolonial, masyarakat pribumi tetap mengembangkan budaya dan tradisi mereka sendiri di tengah dinamika sosial yang ada. Pasar, warung, serta tempat-tempat ibadah menjadi pusat interaksi sosial yang penting, di mana berbagai kelompok etnis bertemu dan berinteraksi. Kehidupan komunitas tetap berjalan dengan kuat, meskipun dalam struktur kota yang didominasi oleh kepentingan kolonial. Pada periode 1940-1950 dinamika sosial masyarakat Bogor juga mulai berubah. Masyarakat pribumi mulai mendapatkan akses lebih besar terhadap ruang publik dan fasilitas kota, seiring dengan melemahnya kontrol kolonial atas tata kota. Namun, warisan kebijakan kolonial masih tetap terasa, terutama dalam distribusi ekonomi dan tata ruang kota, yang menunjukkan kesenjangan antara kawasan elite dan permukiman rakyat.

Kondisi sosial masyarakat Bogor pada periode kolonial tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan administrasi dan tata kota, tetapi juga oleh dinamika segregasi sosial, perubahan ekologi perkotaan, serta struktur ekonomi yang lebih menguntungkan kelompok elite dibandingkan masyarakat pribumi. Warisan kolonial ini masih dapat ditemukan dalam pola sosial dan ekonomi Bogor hingga saat ini, menunjukkan betapa kuatnya dampak kebijakan kolonial terhadap

³² F. C. Pragia, *Pelestarian Lanskap Sejarah Kawasan Khusus Sekitar Kebun Raya Bogor* hlm 71

perkembangan masyarakat kota tersebut. Adapun presentase jumlah penduduk Buitenzorg pada tahun 1923 dan 1930 dalam Mumuh Zakaria M. Kota Bogor: studi tentang perkembangan ekologi kota abad ke-19 hingga ke-20.³³ Sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Penduduk Buitenzorg Tahun 1923 dan 1930

Golongan penduduk	Tahun 1923	Tahun 1930	Peningkatan (%)
Pribumi	37.850	57.933	53,06
Eropa	4.200	5.234	24,62
Cina	5.300	7.178	35,43
Arab	650	1.086	67,08
Jumlah	48.000 Jiwa	71.431 Jiwa	180,19

Sumber: Data ini diolah dari buku Mumuh Muhsin Zakaria, Kota Bogor: Studi tentang Perkembangan Ekologi Kota Abad ke-19 hingga ke-20, hlm. 110. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya tren pertumbuhan penduduk yang pesat pada semua kelompok etnis, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti migrasi, kelahiran alami, serta perkembangan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut selama masa kolonial.

Aktivitas masyarakat Pribumi di Buitenzorg secara perlahan menggeser fungsi ruang publik dari instrumen kekuasaan kolonial menjadi arena sosial rakyat. Meskipun pemerintah kolonial menata alun-alun, taman, dan fasilitas kota untuk mendukung kepentingan Eropa, masyarakat lokal tetap memanfaatkannya untuk berdagang, berinteraksi, dan melakukan kegiatan budaya. Pemerintah kolonial menganggap praktik ini mengganggu ketertiban kota, namun secara sosial praktik ini justru mencerminkan perlawanan mikro terhadap sistem yang eksklusif.³⁴ Setelah kemerdekaan, ruang publik semakin diisi oleh aktivitas politik dan budaya rakyat, mengubahnya menjadi simbol kebangsaan dan partisipasi warga.

Pemerintah kolonial Belanda secara sistematis membatasi akses masyarakat Pribumi terhadap ruang publik di Buitenzorg. Taman kota, peron utama stasiun, dan fasilitas umum lainnya dirancang untuk melayani kelompok Eropa, sementara penduduk Pribumi diarahkan ke jalur tersendiri atau dilarang berada di ruang-ruang

³³ Zakaria, Mumuh M. Kota Bogor: studi tentang perkembangan ekologi kota abad ke-19 hingga ke-20. Indonesia: Sastra Unpad Press, Fakultas Sastra, Universitas Padjadjaran, 2010. Hlm 110

³⁴ Koloniaal Verslag, 1907.

tertentu.³⁵ Namun, di balik struktur yang membatasi, masyarakat Pribumi tetap memanfaatkan ruang secara mandiri. Mereka berdagang di trotoar, berkumpul di taman, dan mengadakan pertemuan organisasi di ruang semi-publik seperti pekarangan atau aula sekolah. Praktik ini sebagai perlawanan sehari-hari terhadap kekuasaan, yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak pasif, tetapi turut membentuk makna ruang publik dari bawah.

2.3 Struktur Perkotaan dan Tata Ruang Kota Bogor

Pemerintah kolonial Belanda menyusun tata kota Buitenzorg berdasarkan prinsip segregasi spasial yang mengutamakan kepentingan ras Eropa. Kota ini dirancang dengan pembagian wilayah administratif yang disebut *wijk*, yang memisahkan kawasan hunian Eropa dari kampung-kampung Pribumi dan Timur Asing. Zonasi tersebut tercermin dalam dokumen resmi seperti daftar kampung yang mengelompokkan kampung Pribumi berdasarkan desa (desa administratif) dan mengaitkannya dengan *wijk* Eropa, seperti Pabaton, Bondongan, Pledang, dan Panaragan. Penempatan kampung Pribumi seperti Kampong Bong, Kampong Embrat, Tjiboelong, dan Boeboelak menunjukkan bahwa meskipun mereka secara administratif tercatat dalam desa yang sama dengan kawasan Eropa, secara spasial mereka ditempatkan di pinggiran wilayah kota kolonial.³⁶

Penamaan kampung-kampung ini bersifat administratif dan berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap mobilitas penduduk non-Eropa. Kampung Pribumi jarang berada tepat di jantung kota yang dikuasai oleh Eropa, melainkan tersebar di wilayah yang lebih jauh dari fasilitas utama kota. Fasilitas publik seperti taman kota, kantor pos, stasiun, dan gedung pemerintahan terpusat di kawasan Eropa. Tata kota ini menempatkan fungsi-fungsi vital dan representatif di sekitar pusat kekuasaan kolonial, dan menjadikan wilayah Eropa sebagai poros utama kehidupan kota. Kampung Pribumi tidak hanya berada di luar poros ini secara geografis, tetapi juga secara simbolis menjadi representasi dari pinggiran sosial dan politik dalam lanskap kota kolonial.

³⁵ Koloniaal Verslag, 1910.

³⁶ J. Faes, *Geschiedenis van Buitenzorg* (Amsterdam: Albrecht, 1902), diakses melalui Delpher. Hlm 19

Bogor berkembang menjadi kota administratif dan pusat penelitian ilmiah di Hindia Belanda pada abad ke-19. Struktur perkotaan dan tata ruangnya mengalami perubahan signifikan, seiring dengan kebijakan kolonial yang menata ruang kota sesuai dengan kepentingan ekonomi dan politik pemerintah kolonial.³⁷ Kawasan inti kota Bogor masih berpusat di sekitar Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor. Kedua tempat ini menjadi simbol dominasi kolonial serta pusat aktivitas administrasi pemerintahan. Wilayah tersebut terhubung dengan jalan utama yang mengarah ke Batavia dan daerah pedalaman, yang memungkinkan mobilitas pejabat kolonial serta distribusi hasil pertanian dari wilayah sekitar.³⁸ Jalan pos utama yang mengarah langsung ke Istana Gubernur Jenderal, yang dilengkapi taman besar yang menyatu dengan Kebun Raya, menunjukkan bagaimana ruang terbuka hijau dan lanskap teratur diprioritaskan sebagai simbol kemegahan dan kekuasaan kolonial.

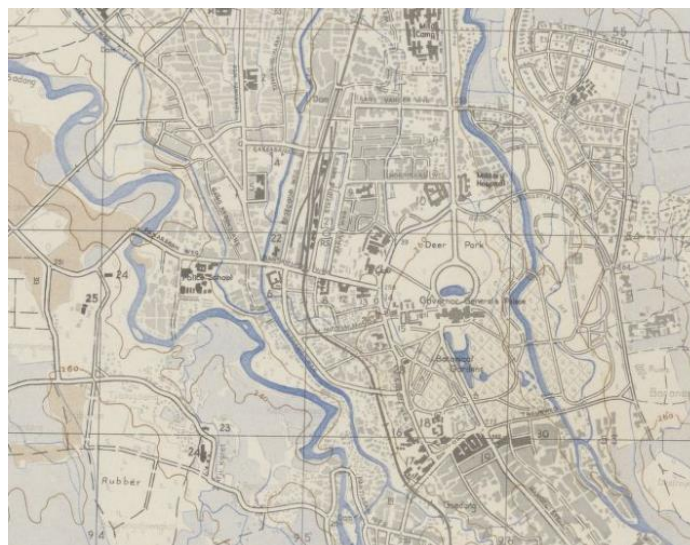
Struktur kota yang memanjang mengikuti punggung bukit antara dua sungai besar, Tjiliwoeng dan Tjidani, memperlihatkan penyesuaian tata kota dengan kondisi geografis, sekaligus menciptakan pembagian fungsi ruang yang jelas. Wilayah pemukiman Eropa tersebar di bagian utara dan barat laut kota, sedangkan pemukiman Cina berkembang di selatan dengan populasi cukup besar. Pemisahan ini mengindikasikan segregasi sosial dan etnis yang menjadi ciri khas kota kolonial. Keberadaan Kebun Raya dan taman-taman yang menghiasi jalan dan halaman penduduk Eropa menambah keunikan lanskap kota ini. Kebun-kebun yang dipenuhi tanaman eksotik bukan hanya berfungsi sebagai pusat penelitian botani dan hortikultura, tetapi juga memperindah kota dan memberikan nuansa khas tropis yang tetap terjaga dari "kebosanan" tata kota kolonial pada umumnya. Selain fungsi ilmiah dan estetika, Buitenzorg berperan sebagai resor kesehatan dan rekreasi dengan fasilitas-fasilitas seperti Istana Gubernur, taman-taman publik, dan lingkungan yang sejuk dan rindang. Hal ini menjadikannya tempat istirahat dan

³⁷ F. C. Pragia, *Pelestarian Lanskap Sejarah Kawasan Khusus Sekitar Kebun Raya Bogor* hlm 97

³⁸ "Buitenzorg," *Jaarboek van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap*, 2002, diakses 3 April 2025, hlm 160

kerja bagi pejabat kolonial, sekaligus pusat kegiatan sosial dan budaya komunitas Eropa.

Penempatan Kebun Raya Bogor sebagai sumbu kota Buitenzorg mencerminkan perencanaan kota kolonial yang sarat akan makna politik, ilmiah, dan simbolik. Dalam perencanaan kota kolonial, Belanda secara strategis menempatkan elemen-elemen penting seperti taman botani, istana, dan kantor administrasi pada posisi sentral sebagai upaya menampilkan keteraturan dan superioritas peradaban Eropa di tanah jajahan. Kebun Raya Bogor, tidak sekadar berfungsi sebagai taman botani, tetapi juga menjadi pusat visual dan simbolik yang mengatur orientasi tata ruang kota. Tata letak ini menunjukkan perwujudan kekuasaan kolonial dalam bentuk ruang yang terstruktur dan terkontrol. Dalam kota kolonial, pengelompokan ruang dan bangunan sengaja dibuat untuk memisahkan antara komunitas Eropa dan masyarakat pribumi, ruang-ruang publik seperti taman atau kebun botani diletakkan di pusat sebagai simbol keteraturan dan kemajuan.³⁹



Gambar 2 Peta Java Town Plans 1:5,000 Tahun 1946
Sumber: KITLV

Peta Java Town Plans 1:5,000 Buitenzorg tahun 1946, memberikan gambaran jelas tentang tata ruang kota Buitenzorg pada masa kolonial Belanda, yang menegaskan posisi Kebun Raya Bogor sebagai sumbu kota. Terletak di pusat

³⁹ D. Ratih, "Kota Kolonial Hindia Belanda 1800–1942: Ditinjau dari Permasalahan Sejarah Perkotaan," *Jurnal Artefak*, vol. 9, no. 1, 2022, hlm. 54.

peta, Kebun Raya, yang ditandai sebagai Botanical Garden, dikelilingi oleh jaringan jalan radial seperti Jalan Ir. H. Juanda dan Jalan Pajajaran, menciptakan pola sirkulasi konsentris yang berpusat pada kebun ini, dengan Istana Bogor di sisi baratnya sebagai elemen pendukung. Sungai Ciliwung yang melintasi kota, lengkap dengan kanal-kanal buatan yang terlihat pada peta, mendukung sistem drainase dan estetika Garden City, sekaligus mempermudah akses menuju Kebun Raya melalui jembatan-jembatan kecil.

Legenda peta menunjukkan zonasi lahan, dengan Kebun Raya sebagai area hijau utama yang dikelilingi permukiman kolonial dan lahan pertanian, menjadikannya titik orientasi sosial dan ekonomi dengan jalan utama yang menghubungkan ke pasar di sisi timur memperkuat fungsi ini. Selain itu, Annotations pada peta mencantumkan bangunan penting seperti *Government House* dan *Residency Office* di sekitar Kebun Raya, menegaskan simbolisme kolonial dan dominasi Belanda atas wilayah ini. Secara geografis, kontur peta menunjukkan letak Kebun Raya di area datar dengan iklim sejuk, ideal untuk penelitian botani, sebagaimana dicatat Reinwardt pada 1817, sehingga mendukung peran kebun ini sebagai pusat ilmiah dan wisata. Dengan demikian, peta ini menjadi bukti visual bahwa Kebun Raya Bogor adalah sumbu kota Buitenzorg, mengintegrasikan fungsi ilmiah, administratif, dan estetika dalam tata ruang kolonial.

Segregasi sosial dalam tata kota semakin terlihat pada periode ini. Permukiman Eropa tetap berada di sekitar pusat administrasi, dengan fasilitas yang lebih baik dibandingkan kawasan pribumi. Sementara itu, masyarakat pribumi dan komunitas Tionghoa ditempatkan di wilayah perdagangan dan permukiman padat di sekitar Pasar Bogor dan Surya Kencana. Colombijn dalam *Under Construction* (2010) mencatat bahwa perbedaan akses terhadap fasilitas publik dan infrastruktur mencerminkan kebijakan kolonial yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok elite Eropa. Masyarakat pribumi hanya memiliki akses terbatas terhadap

ruang kota yang berkembang, sehingga terjadi kesenjangan dalam kualitas kehidupan perkotaan.⁴⁰

Perubahan tata ruang kota semakin terlihat setelah tahun 1920-an, ketika pemerintah kolonial mulai mengembangkan sistem transportasi dan memperbaiki infrastruktur kota. Seperti jalur kereta api Batavia–Buitenzorg yang telah beroperasi sejak 1873 semakin meningkatkan konektivitas Bogor dengan Batavia, menjadikan kota ini bagian penting dalam jaringan transportasi kolonial.⁴¹ Pembangunan jalan baru serta perluasan permukiman di sekitar kota menunjukkan bagaimana Bogor berkembang sebagai kota satelit Batavia, yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi tetapi juga sebagai pusat penelitian agrikultur dan perkebunan. Hindia Belanda mengalami perubahan politik akibat Perang Dunia II dan Revolusi Nasional Indonesia, tata ruang kota Bogor mulai mengalami transisi dari sistem kolonial ke sistem perkotaan yang lebih inklusif pada periode 1940 hingga awal 1950, ketika.

Struktur kota yang sebelumnya didominasi oleh segregasi mulai berubah dengan meningkatnya akses bagi masyarakat pribumi terhadap ruang publik dan fasilitas kota. Namun, warisan tata ruang kolonial masih tetap terasa dalam distribusi permukiman dan infrastruktur, di mana kawasan bekas permukiman Eropa tetap lebih berkembang dibandingkan daerah pribumi. Dengan demikian, perkembangan struktur perkotaan dan tata ruang Bogor pada periode 1908-1950 sangat dipengaruhi oleh kebijakan kolonial, segregasi sosial, serta sistem kepemilikan tanah partikelir. Warisan dari periode ini masih dapat dilihat hingga saat ini dalam bentuk perbedaan tata ruang antara kawasan elite dan permukiman rakyat, serta dalam pola pertumbuhan kota yang masih mengikuti jalur infrastruktur kolonial yang telah ada sejak awal abad ke-20.

Statistik penduduk pada tahun 1861, jumlah penduduk di wilayah Buitenzorg mencapai ribuan jiwa, dengan komposisi yang mencerminkan keberagaman etnis di Hindia Belanda. Data menunjukkan bahwa populasi terdiri

⁴⁰ Freek Colombijn, *Under Construction: The Politics of Urban Space and Housing during the Decolonization of Indonesia 1930-1960*, 2010. Hlm 30.

⁴¹ Michiel van Ballegoijen de Jong, *Spoorwegstations op Java*. Hlm 111.

dari penduduk pribumi, orang Eropa, serta komunitas Tionghoa dan Timur Asing yang terlibat dalam berbagai sektor ekonomi.⁴² Seiring dengan pertumbuhan perkebunan dan penelitian pertanian di Kebun Raya Bogor, jumlah penduduk mengalami peningkatan, didorong oleh masuknya pekerja dari berbagai daerah yang mencari peluang kerja di sektor pertanian dan administrasi kolonial. Perkembangan Bogor sebagai pusat administrasi juga didukung oleh kebijakan kolonial yang memperkuat fungsi kota ini sebagai pusat penelitian dan pengelolaan sumber daya agraria. Dengan adanya infrastruktur yang terus berkembang dan kebijakan administratif yang semakin kompleks, Buitenzorg menjadi salah satu kota terpenting di Pulau Jawa selama periode kolonial.

Kota ini juga berkembang sebagai pusat perdagangan dan perekonomian, dengan adanya pasar-pasar yang menjual berbagai hasil pertanian dan komoditas perkebunan. Keberadaan komunitas Eropa, Tionghoa, dan pribumi di Buitenzorg menciptakan dinamika sosial yang khas, di mana kelompok-kelompok ini berperan dalam berbagai sektor ekonomi, mulai dari perdagangan hingga administrasi pemerintahan.⁴³ Perkembangan Bogor sebagai pusat administrasi juga didukung oleh kebijakan kolonial yang memperkuat fungsi kota ini sebagai pusat penelitian dan pengelolaan sumber daya agraria. Dengan adanya infrastruktur yang terus berkembang dan kebijakan administratif yang semakin kompleks, Buitenzorg menjadi salah satu kota terpenting di Pulau Jawa selama periode kolonial.

Buitenzorg berkembang sebagai pusat pemerintahan alternatif di luar Batavia, dengan infrastruktur yang menunjang kehidupan elit kolonial. Struktur Buitenzorg mencerminkan pola pemisahan yang jelas antara kawasan Eropa dan pribumi, sebagaimana juga terjadi di kota-kota kolonial seperti Semarang, Bandung, Surabaya, Medan dan kota di Hindia Belanda lainnya. Dampak kebijakan kolonial terhadap struktur perkotaan Buitenzorg terlihat dalam pembagian wilayah berdasarkan ras dan status sosial. Nas menjelaskan bahwa perencanaan kota dibuat untuk mendukung aksesibilitas bagi elite Eropa dengan infrastruktur yang lebih

⁴² Zakaria, Mumuh M. Kota Bogor: studi tentang perkembangan ekologi kota abad ke-19 hingga ke-20. Indonesia: Sastra Unpad Press, Fakultas Sastra, Universitas Padjadjaran, 2010. Hlm 108

⁴³ *Ibid.*, hlm 112.

baik, sementara masyarakat pribumi tinggal di kawasan pinggiran dengan fasilitas yang terbatas.⁴⁴ Selain itu, kebijakan perumahan dan pengembangan infrastruktur di Bogor mencerminkan ketimpangan akses terhadap ruang kota. Wilayah-wilayah strategis diperuntukkan bagi orang Eropa dan kelompok elite lokal yang memiliki hubungan dengan pemerintah kolonial, sedangkan masyarakat pribumi ditempatkan di kawasan dengan akses terbatas terhadap fasilitas umum. Colombijn menyoroti bahwa pola segregasi ini berlanjut hingga masa dekolonisasi, kota-kota seperti Bogor mengalami transisi dalam tata kelola perkotaan, namun masih mempertahankan struktur sosial yang diwariskan dari periode kolonial.

Pemerintah kolonial Belanda menerapkan sejumlah kebijakan di Kota Bogor yang bertujuan untuk memperkuat kontrol kekuasaan serta mendukung kepentingan ekonomi dan politik colonial pada abad ke-19. Salah satu kebijakan utama adalah penetapan Bogor sebagai tempat kediaman resmi Gubernur Jenderal, yang menjadikan kota ini sebagai pusat administratif dan peristirahatan elit kolonial. Selain itu, didirikan Kebun Raya Bogor pada tahun 1817 sebagai pusat penelitian botani tropis, yang juga mendukung pengembangan sektor agrikultur kolonial. Kebijakan pembangunan infrastruktur turut dijalankan melalui pendirian gedung pemerintahan, fasilitas kesehatan, serta jalur transportasi, termasuk pembukaan jalur kereta api Batavia–Buitenzorg pada 1873 yang memperkuat konektivitas ekonomi. Pemerintah kolonial juga menerapkan sistem tata ruang kota yang bersifat rasial, dengan memisahkan kawasan permukiman Eropa dan pribumi. Selain itu, melalui Agrarische Wet 1870, tanah-tanah di sekitar Bogor dibuka untuk perkebunan swasta, yang berdampak pada perubahan kepemilikan dan fungsi lahan. Kebijakan pendidikan pun diterapkan secara terbatas, dengan mendirikan sekolah bagi anak-anak Eropa dan pribumi terpilih untuk mendukung kontrol budaya dan sosial.

⁴⁴ Zakaria, Mumuh M. Kota Bogor: studi tentang perkembangan ekologi kota abad ke-19 hingga ke-20. Indonesia: Sastra Unpad Press, Fakultas Sastra, Universitas Padjadjaran, 2010. Hlm 91

Seluruh kebijakan ini menunjukkan bahwa pembangunan Kota Bogor sangat dipengaruhi oleh kepentingan kolonial yang bersifat eksploitatif dan diskriminatif.

Infrastruktur yang dibangun pada abad ke-19, termasuk jalur kereta api Batavia-Buitenzorg, mempercepat urbanisasi dan meningkatkan mobilitas penduduk. Namun, urbanisasi ini lebih menguntungkan kelas atas kolonial daripada masyarakat pribumi yang masih menghadapi pembatasan dalam akses terhadap ruang publik dan layanan kota. pembangunan jalur kereta api Batavia-Buitenzorg pada tahun 1873 menandai fase penting dalam modernisasi transportasi di Jawa. Jalur ini mempermudah akses antara Bogor dan Batavia, mempercepat pergerakan pejabat kolonial serta distribusi hasil pertanian dan perkebunan dari daerah pedalaman ke pusat ekonomi kolonial. Infrastruktur transportasi yang semakin berkembang menjadikan Bogor sebagai kota satelit penting yang mendukung administrasi kolonial.⁴⁵

Belanda mendirikan Departemen Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan di Bogor pada tahun 1904. Keberadaan lembaga ini menandakan bahwa Bogor tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat penelitian agrikultur dan perkebunan di Hindia Belanda. Adrian Vickers mencatat bahwa perkembangan institusi ilmiah di Hindia Belanda pada masa kolonial bertujuan untuk mendukung eksploitasi sumber daya alam dan memastikan efisiensi ekonomi kolonial.⁴⁶ Selain itu, keberadaan institusi pendidikan dan penelitian seperti *Bibliotheek en Museum voor Land en Volkenkunde* semakin memperkuat posisi Bogor sebagai pusat studi ilmiah kolonial. Keberadaan Kebun Raya Bogor juga berperan dalam penelitian botani dan agrikultur yang mendukung industri perkebunan kolonial. Menurut Vickers, pengembangan ilmu pengetahuan di Hindia Belanda diarahkan untuk melayani kepentingan ekonomi dan memperkuat kontrol kolonial terhadap wilayah jajahan.⁴⁷ Dengan statusnya sebagai

⁴⁵ Robert Cribb, *Historical Atlas of Indonesia* (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2000), hlm 33.

⁴⁶ Adrian Vickers, *A History of Modern Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 97.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 105-106

pusat administratif dan ilmiah, Bogor mengalami pertumbuhan signifikan dalam pembangunan infrastruktur pemerintahan dan pemukiman elit kolonial. Struktur kota Bogor dirancang untuk memisahkan kawasan pemukiman Eropa dari penduduk pribumi, mencerminkan kebijakan segregasi sosial yang umum diterapkan di kota-kota kolonial lainnya. Pembangunan fasilitas pemerintahan, institusi penelitian, dan pemukiman elit memperkuat peran Bogor sebagai salah satu pusat penting dalam administrasi kolonial Hindia Belanda.